

## **IMPLEMENTASI *SMART GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLORA**

**Oleh:**

Prananta Radika  
20/458669/GE/09352

### **INTISARI**

Pengembangan *smart governance* di Kabupaten Blora terus diupayakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Penelitian ini memuat identifikasi pelayanan publik apa saja yang tersedia, faktor pendorong maupun penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan bagaimana dampak implementasi *smart governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blora. Ketiga hal tersebut kemudian untuk dielaborasi untuk menganalisis kebutuhan arah pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab implementasi *smart governance*. Data sekunder berupa dokumen perencanaan yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta studi pustaka lainnya. Analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis arahan kebutuhan pengembangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis layanan berbasis teknologi yang tersedia, yaitu layanan digital, layanan jemput bola, dan layanan terintegrasi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor pendorong yang memuat kesadaran kebutuhan pengembangan, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan komunikasi. Kedua faktor penghambat yang memuat ketidakpastian politik dan perubahan prioritas, resistensi internal dan eksternal, teknologi, dan pendanaan. Dampak implementasi juga dirasakan utamanya adalah meningkatnya efisiensi layanan dan secara tidak langsung berpengaruh pada daya saing wilayah. Analisis kebutuhan pengembangan memuat beberapa strategi terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi internal pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, optimalisasi sumberdaya, dan diversifikasi dana, serta perencanaan kontingensi.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Smart Governance*, Pelayanan Publik

## **IMPLEMENTATION OF SMART GOVERNANCE IN PUBLIC SERVICE DELIVERY IN BLORA REGENCY**

**By:**

Prananta Radika  
20/458669/GE/09352

### **ABSTRACT**

The development of *smart governance* in Blora Regency continues to be pursued in implementing public services to improve the quality of public services, increase transparency, and increase public participation in government administration. This study identifies what public services are available, the driving and inhibiting factors in the implementation of public services, and the impact of *smart governance* implementation in the implementation of public services in the Blora Regency. These three things are then to be elaborated to analyze the need for development direction in the delivery of public services.

The method used in this study is qualitative descriptive. Primary data is obtained from interviews, observations, and documentation of several Regional Apparatus Organizations that are responsible for the implementation of *smart governance*. Secondary data are in the form of planning documents obtained from related Regional Apparatus Organizations, as well as other literature studies. SWOT analysis is performed to analyze the direction of development needs.

The results of the study show three types of technology-based services available: digital services, doorstep services, and integrated services. Two factors affect implementation: driving factors that contain awareness of development needs, policies, institutions, human resources, technology, and communication. Both inhibiting factors include political uncertainty and changes in priority, internal and external resistance, technology, and funding. The impact of implementation is also felt mainly in the increase in service efficiency and indirectly affects regional competitiveness. Analysis of development needs consists of several strategies related to improving the quality of human resources, strengthening internal government coordination, collaboration with the private sector, optimizing resources, diversifying funds, and contingency planning.

**Keywords:** Implementation, Smart Governance, Public Service